

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Memiliki birokrasi yang bersih dan adanya pelayanan publik yang prima merupakan tujuan dari reformasi birokrasi yang tertuang dalam *grand design* reformasi birokrasi 2010-2025. Untuk mendukung pelaksanaan reformasi tersebut pemerintah telah menerapkan konsep *New Public Management* (NPM) yang beberapa dekade terakhir ini telah memberikan kontribusi positif pada reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia terutama dalam penyusunan laporan keuangan. Reformasi bidang keuangan dimulai saat pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah (Rahmayani, 2018). Akuntabilitas publik merupakan tuntutan dari *principal* sebagai pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dari *agent* sebagai pihak pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab yang diamatkan kepadanya (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas merupakan konsep yang luas,

sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam suatu kebijakan publik yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan bersama melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Pelaporan keuangan pemerintah pusat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga menyatakan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan Kementerian/Lembaga meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disertai dengan Pernyataan Telah Direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Menurut PMK 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP adalah laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Pusat yang merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan BUN (LK BUN). Semakin banyak LKKL dan LK BUN yang memperoleh opini dari BPK akan menjadi

pertimbangan bagus atau tidaknya opini untuk LKPP secara keseluruhan. Namun berdasarkan hasil audit BPK atas laporan keuangan tahun 2021, masih ada kementerian/lembaga yang masih mendapat opini wajar dengan pengecualian. Hal ini menandakan, diperlukannya upaya-upaya yang tepat untuk mempertahankan opini WTP atas LKPP dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan BMKG terdapat 4 kriteria Laporan Keuangan BMKG (LK BMKG) dalam pemberian opini BPK atas laporan keuangan untuk memperoleh opini terbaik. Pertama, apakah LK BMKG tersebut disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau tidak. Kedua, kecukupan pengungkapan, apakah seluruh transaksi diungkap dalam laporan keuangan (*adequate disclosures*). Ketiga, bagaimana tingkat kepatuhan BMKG terhadap peraturan perundang-undangan dalam tata kelola keuangan. Keempat, bagaimana Sistem Pengendalian Internal (SPI) di BMKG kuat atau tidak.

Tahun 2021 laporan keuangan konsolidasi BMKG mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, namun dalam penyusunan laporan keuangan pada Satuan Kerja di Lingkungan BMKG secara konsolidasi masih terdapat kelemahan-kelemahan. Hal ini tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2021 dan hasil audit selanjutnya akan mempengaruhi gambaran LK konsolidasi BMKG tahun 2021 diantaranya terkait kompetensi sumber daya manusia terdapat kelebihan bayar dan sisa LS Bendahara yang

belum disetor kembali ke kas negara serta penatausahaan dan pengamanan asset yang belum tertib.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di BMKG Pusat yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pembina dalam proses penyusunan laporan keuangan pada seluruh satuan kerja di Lingkungan BMKG. Sebagian besar petugas pengelola dan penyusun laporan keuangan Satuan Kerja di Lingkungan BMKG memiliki latar belakang Pendidikan non akuntansi, disampaikan lebih lanjut oleh Dwi Budi Sutrisno sebagai Sekretaris Utama BMKG dalam pembukaan rekonsiliasi laporan keuangan semester II Tahun 2021 tentang pentingnya memiliki SDM yang kompeten dibidangnya dan alat-alat yang berkualitas agar BMKG dapat meningkatkan kinerjanya (bmgk.go.id, 2022)

Terdapat perbedaan proses rekonsiliasi pada aplikasi SAKTI dimana proses *upload* ADK rekon ke aplikasi e-Rekon LK oleh satuan kerja sudah tidak diperlukan lagi karena proses sudah diganti dengan *push data* GL dan BMN dari *database* SAKTI ke *database* monsakti secara terpusat. Proses *push data* akan dilakukan oleh sistem secara berkala, apabila periode rekonsiliasi sudah dibuka dan satker sudah tutup periode sampai dengan periode rekon.

Beberapa kelemahan-kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2021 pada BMKG, serta fenomena di atas membuktikan bahwa masih lemahnya kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan keuangan yang masih terus dikembangkan, dan proses pelaksanaan rekonsiliasi data diduga

mempengaruhi hasil laporan keuangan pemerintah yang diharapkan berkualitas dan mampu untuk dipertanggungjawabkan. Seperti yang diungkapkan oleh Humiang (2015) beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi berbasis akrual diantaranya, a) sistem akuntansi *dan IT based system*, b) tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, c) komitmen dari pimpinan, d) resistensi terhadap perubahan

Menurut Ichsan (2013), salah satu keberhasilan dari penerapan akuntansi akrual pada akhirnya dapat dilihat dalam opini dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. Nasution (2008) juga menyampaikan bahwa terdapat 6 (enam) langkah (komponen) yang perlu diperhatikan agar laporan keuangan pemerintah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah salah satunya kompetensi sumber daya manusia. Menurut Hervesi (2005) kompetensi adalah ciri seseorang yang dapat dilihat dari keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimilikinya dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Adhitama, *et.al* (2019) juga berpendapat bahwa faktor pertama yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah adalah kompetensi sumber daya manusia. Adhitama, *et.al* menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan bekal pendidikan, pelatihan, pengalaman, sertifikasi, maupun uji kompetensi yang memadai. Sumber daya manusia dalam hal ini pengelola keuangan, jika tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis (Hanifa *et.al*, 2016).

Seiring dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan, maka pemerintah perlu mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah, karena pemanfaatan teknologi informasi dapat mempersingkat penyesuaian penerapan pelaporan keuangan (Macmillan, 2003). Teori *New Public Management* menyatakan bahwa perbaikan secara terus menerus telah dilakukan pemerintah salah satunya dengan meningkatkan kualitas teknologi sistem informasi untuk mendukung tercapainya peningkatan kualitas laporan keuangan (Irfani *et.al*, 2020). Pemanfaatan teknologi informasi yaitu aplikasi SAKTI yang menggunakan satu *database* terpusat dalam pengelolaan keuangan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern. Pengendalian intern tersebut mencakup proses rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntasikan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntasikan oleh Bendahara Umum Negara. Dengan melakukan rekonsiliasi data keuangan saat proses penyusunan laporan keuangan dapat menjamin ketelitian dan akurasi pencatatan data akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Peran rekonsiliasi data sangat penting dalam rangka

meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan (Rahmayani, 2018).

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar bukanlah sesuatu yang mudah, perlu kesiapan dan koordinasi seluruh unit entitas akuntansi dan unit pelaporan untuk melaksanakan peran dan kewenangan masing-masing dalam penyusunan laporan keuangan. Jika komitmen organisasi telah terbangun akan mendukung penerapan *New Public Management* dalam hal ini keberhasilan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Veronica & Krisnadewi (2009) menjelaskan bahwa komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam diri karyawan untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi. Adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Siregar (2017), yaitu komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Terdapat inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya yang membahas terkait kualitas laporan keuangan. Rahmayani (2018) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan rekonsiliasi data secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan, hasil penelitian Sa'adah (2021) menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pinem (2015) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa teknologi informasi, pengendalian intern, dan rekonsiliasi data berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Siregar (2017) menyimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Hernanda (2020) menyebutkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pendekatan kontinjensi dapat digunakan sebagai solusi atas ketidakkonsistenan hasil-hasil riset sebelumnya (Suarmika, 2016). Pendekatan kontinjensi memberikan pandangan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dipengaruhi oleh variabel yang bersifat kondisional. Dalam penelitian ini, komitmen organisasi diduga dapat berperan sebagai variabel pemoderasi, karena dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi, termasuk tujuan untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan komitmen di dalam organisasi.

Menurut Eker (2007) komitmen organisasional merupakan suatu pengikat, yang memberi pengaruh pada tujuan dan nilai, serta kepentingan pada organisasi, terlepas dari instrumental yang semata-mata cukup, ditinjau dari konsep menurut tiga dimensi, yaitu identifikasi, keterlibatan, dan kesetiaan. Siregar (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasional dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan

organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi, karena itu komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) bagi pekerja terhadap organisasi. Jika anggota organisasi terikat dengan nilai-nilai organisasi maka mereka akan senang dalam bekerja, sehingga mempunyai tanggungjawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangannya melalui laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa komitmen organisasi merupakan variabel yang dapat berperan dalam memoderasi hubungan pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah, seperti yang telah disimpulkan oleh Suarmika (2016), komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan penerapan SIKD terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Begitu juga dengan Yusrianti *et.al* (2021) menyimpulkan komitmen organisasi memoderasi murni (*Pure Moderator*) dengan memperkuat pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura. Hasil yang berbeda disimpulkan oleh Putra *et.al* (2021) yang menyimpulkan bahwa komitmen organisasi tidak memoderasi hubungan antara kecanggihan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

Fenomena kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga negara di atas dan adanya inkonsistensi temuan penelitian terdahulu, serta masih adanya

kontroversial pada hasil efek moderasi variabel komitmen organisasi merupakan ide yang mendasari penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Rekonsiliasi Data terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini dimotivasi dan dilatarbelakangi oleh beberapa masalah, yaitu: **Pertama**, perlu dilakukan suatu penelitian untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga karena berdasarkan hasil audit BPK atas laporan keuangan tahun 2021, masih ada kementerian/lembaga yang mendapat opini wajar dengan pengecualian. Hal ini menandakan, diperlukannya kerja keras pemerintah dalam melakukan upaya-upaya yang tepat untuk mempertahankan opini WTP atas LKPP dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah karena semakin banyak LKKL dan LK BUN yang memperoleh opini dari BPK akan menjadi pertimbangan bagus atau tidaknya opini untuk LKPP secara keseluruhan.

Kedua, terdapat beberapa kelemahan-kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI baik pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun pada Laporan Keuangan BMKG. Fenomena di atas membuktikan bahwa masih lemahnya kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi yang kurang baik dalam pencatatan laporan keuangan, dan proses pelaksanaan rekonsiliasi data yang tidak

tepat waktu diduga mempengaruhi hasil laporan keuangan pemerintah yang diharapkan berkualitas dan mampu untuk dipertanggungjawabkan.

Ketiga, adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan serta adanya kontroversial pada hasil efek moderasi variabel komitmen organisasi. Seperti penelitian Rahmayani (2018) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan rekonsiliasi data secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan, hasil penelitian Sa'adah (2021) menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pinem (2015) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa teknologi informasi, pengendalian intern, dan rekonsiliasi data berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Siregar (2017) menyimpulkan bahwa komitmen organisasi jika berperan sebagai variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Hernanda (2020) menyebutkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi berdasarkan hasil penelitian Suarmika (2016), komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan penerapan SIKD terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Begitu juga dengan Yusrianti et.al (2021) menyimpulkan

komitmen organisasi memoderasi murni (*Pure Moderator*) dengan memperkuat pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura. Hasil yang berbeda disimpulkan oleh Putra et.al (2021) yang menyimpulkan bahwa komitmen organisasi tidak memoderasi hubungan antara kecanggihan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah diperlukan agar penelitian lebih berfokus dan tidak meluas dari tujuan penelitian. Penelitian ini membataskan ruang lingkup, hanya meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, rekonsiliasi data dan komitmen organisasi. Responden pada penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki tupoksi dalam pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di seluruh Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena serta uraian dalam latar belakang, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja di lingkungan BMKG RI?

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja di lingkungan BMKG RI?
3. Apakah rekonsiliasi data berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja di lingkungan BMKG RI?
4. Apakah komitmen organisasi dapat memperkuat hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja di lingkungan BMKG RI?
5. Apakah komitmen organisasi dapat memperkuat hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja di lingkungan BMKG RI?
6. Apakah komitmen organisasi dapat memperkuat hubungan antara rekonsiliasi data dengan kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja di lingkungan BMKG RI?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja di lingkungan BMKG RI.
2. Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja di lingkungan BMKG RI.
3. Mengetahui pengaruh rekonsiliasi data terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja di lingkungan BMKG RI.

4. Mengetahui kemampuan komitmen organisasi dalam memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja di lingkungan BMKG RI.
5. Mengetahui kemampuan komitmen organisasi dalam memoderasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja di lingkungan BMKG RI.
6. Mengetahui kemampuan komitmen organisasi dalam memoderasi hubungan rekonsiliasi data dengan kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja di lingkungan BMKG RI.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang kajian sektor publik, khususnya penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
2. Bagi Satuan Kerja di lingkungan BMKG, diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam hal meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat mempertahankan opini terbaik dari BPK.
3. Bagi Pengembangan Ilmu (Akademisi), hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengembangan penelitian selanjutnya dan memberi masukan tentang kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP).

1.7 Penjelasan Istilah

Penjelasan-penjelasan yang diuraikan pada tesis ini terdapat beberapa istilah atau singkatan yang digunakan, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. NPM : *New Public Management*
2. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4. PMK : Peraturan Menteri Keuangan
5. LK BMKG : Laporan Keuangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
6. SAKTI : Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
7. SIKD : Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. LKKL : Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
9. LRA : Laporan Realisasi Anggaran
10. LO : Laporan Operasional
11. LPE : Laporan Perubahan Ekuitas
12. SAP : Standar Akuntansi Pemerintah
13. KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
14. LKPD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
15. CaLK : Catatan atas Laporan Keuangan
16. APIP : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
17. LKPP : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
18. BPK RI : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
19. SPI : Sistem Pengendalian Internal

- 20. BAR : Berita Acara Rekonsiliasi
- 21. LK BUN : Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
- 22. WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
- 23. BMKG : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
- 24. LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan
- 25. STMKG : Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

1.8 Asumsi Penelitian

Asumsi bisa dikatakan sebagai anggapan dasar yaitu suatu hal yang diyakini oleh peneliti yang harus dirumuskan secara jelas. Suharsimi (2002) menyebutkan tujuan dalam merumuskan asumsi yaitu: a) agar ada dasar pijakan yang kukuh bagi masalah yang sedang diteliti, b) untuk mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian, c) guna menentukan dan merumuskan hipotesis.

Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, asumsi yang penulis rumuskan adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, rekonsiliasi data, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, serta komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan rekonsiliasi data dengan kualitas laporan keuangan.

1.9 Rencana Publikasi

Penelitian ini akan dipublikasikan pada Jurnal International Journal of Social Science and Business (IJSSB).